

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 6 MEI – 15 AGUSTUS 2021
(Masa Sidang Mulai Tanggal 6 Mei – 15 Juli 2021
dan Masa Reses Mulai Tanggal 16 Juli 2021 – 15 Agustus 2021)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

A. RUU Usul Inisiatif Prioritas Komisi I DPR RI Tahun 2021

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran)

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Maret 2021 telah menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yang salah satunya adalah RUU tentang Perubahan atas UU Penyiaran.

B. RUU Usul Inisiatif Prioritas Pemerintah Tahun 2021

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Juni 2021 telah memutuskan menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang PDP. Selanjutnya Panja RUU tentang PDP telah melaksanakan rapat-rapat bersifat tertutup pada tanggal 22 Juni 2021, 24 Juni 2021, 28-30 Juni 2021.

Dari seluruh total 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 143 DIM dengan 125 DIM yang telah disetujui dan disepakati, 10 DIM *pending*, 6 DIM perubahan substansi dan 2 DIM usulan baru. Sedangkan, DIM yang belum dibahas berjumlah 228 DIM dimana mayoritas DIMnya berkaitan dengan kelembagaan.

II. FUNGSI ANGGARAN

Sesuai dengan penjadwalan Rapat dari Badan Anggaran DPR RI, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan RKA dan RKP Mitra Kerja Komisi I DPR RI Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Juni 2021 telah melaksanakan Raker dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

2. Tanggal 3 Juni 2021 telah melaksanakan Raker dengan Menteri Luar Negeri RI.
3. Tanggal 7 Juni 2021 telah melaksanakan Raker dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
4. Tanggal 8 Juni 2021 telah melaksanakan RDP dengan Gubernur Lemhanas dan Sesjen Wantannas RI.
5. Tanggal 9 Juni 2021 telah melaksanakan Raker dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan RDP dengan Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).
6. Tanggal 9 Juni 2021 telah melaksanakan RDP dengan Dewas dan Direksi LPP RRI dan Dewas dan Direksi LPP TVRI
7. Tanggal 10 Juni 2021 telah melaksanakan Raker dengan Kepala Badan Intelijen Negara.
8. Tanggal 10 Juni 2021 Rapat Intern Komisi I DPR RI bersifat tertutup membahas Rekapitulasi RKA dan RKP Mitra Kerja Komisi I DPR RI untuk selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi

III. FUNGSI PENGAWASAN

A. PANJA PENGAWASAN

Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal, 6 Mei 2021 telah membentuk Panja Pengawasan yaitu :

- 1) Panja Diplomasi Luar Negeri Komisi I DPR RI, tanggal 18 Mei 2021 telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Diplomasi Luar Negeri Terkait Penanggulangan Covid-19 Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemenlu selaku Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE), dan Dirjen Protokol & Konsuler dengan agenda untuk mendengarkan penjelasan mengenai :
 - Perkembangan Diplomasi Indonesia di Kancah Global untuk memenuhi Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Dalam Negeri yang meliputi :
 1. Tantangan dan hambatan kerja sama bilateral maupun multilateral pengadaan vaksin;
 2. Munculnya nasionalisme vaksin, embargo vaksin, dan vaksin sebagai unjuk kekuatan pengaruh negara-negara besar;
 - Perkembangan diplomasi perlindungan terkait vaksinasi WNI di luar negeri;
 - Strategi diplomasi Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19; dan
 - Penguatan diplomasi Indonesia untuk keamanan kesehatan (*health security*).
- 2) Panja Kesejahteraan Prajurit Komisi I DPR RI, tanggal 24 Mei 2021 telah melaksanakan Rapat Intern dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
 - Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI menyepakati untuk mendesak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja Kemhan dan TNI, Kenaikan Tunjangan Prajurit Yang Bertugas di Wilayah Terpencil, Tunjangan Oditur Militer, Tabungan Hari Tua, Tunjangan Khusus TNI Untuk Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga, Wan TNI, Satuan Khusus TNI, dan kenaikan ULP Prajurit dan Uang Makan PNS.
 - Terkait dengan pemenuhan kesejahteraan prajurit di bidang perumahan perlunya mengakselerasi sertifikasi lahan /tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI dengan melakukan Rapat Kerja/ RDP bersama Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI menyepakati untuk mendorong Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Prajurit TNI, yang di tugaskan di Kodam XVI/Patimura, wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, daerah-daerah 3T (selain prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat).
- Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI akan mendorong peningkatan uang makan operasi (UMO) selain uang lauk pauk (ULP).
- Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI akan mendorong terealisasinya perumahan dinas dan perumahan pribadi bagi prajurit TNI dengan melakukan Rapat Kerja/RDP kepada Dirjen Renhan Kemhan, Asrena Kasad, Asena Kasal, dan Asrena Kasau serta ASABRI.

- 3) Panja Alutsista TNI;
- 4) Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19; dan
- 5) Panja Keamanan Laut.

Panja Alutsista TNI, Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19, dan Panja Keamanan Laut dalam Masa Persidangan V ini belum melaksanakan rapat-rapat.

B. PENGAMBILAN SUMPAH TIM PENGAWAS INTELIJEN NEGARA DI DPR RI

Berdasarkan jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 8 April 2021, dan Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 6 Mei 2021, dan sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR RI Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa Calon Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan ayat (4) Pengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipandu oleh pimpinan DPR secara tertutup di Komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen.

Pengambilan Sumpah Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR RI pada tanggal 10 Juni 2021, dipandu oleh Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,MH, Wakil Ketua DPR RI/Korekku dengan Rohaniawan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, H. Ismail Sulaiman, MA.,Ag., Kasi Penyuluhan dan Pengembangan Syariah pada Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Bersifat tertutup.

- C. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Wakil Menteri Pertahanan RI., dan Kepala BAIS TNI tanggal 31 Mei 2021 bersifat tertutup, dengan acara :**
- a. Strategi dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024;
 - b. Perkembangan MEF Tahap III Tahun 2020-2024;
 - c. Perkembangan Situasi dan Kondisi Keamanan di Papua dan Papua Barat;
 - d. Peran dan Fungsi Intelijen dalam mengamankan wilayah perbatasan; dan
 - e. Isu-isu mengenai pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

D. UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN FIT AND PRROPER TEST CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LPP RRI PERIODE 2021-2026

Sehubungan dengan Keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016-2021 berakhir pada 4 April 2021, pada Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 7 September 2021,

Komisi I DPR RI telah meminta agar Kemkominfo segera membentuk Pansel dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi I DPR RI.

Berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-11/Pres/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Penyampaian nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 sebanyak 15 nama Calon yaitu :

- 1) Sdr. Agnes Irwanti (Unsur Masyarakat);
- 2) Sdr. Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (Unsur Masyarakat);
- 3) Sdr. Bondan Kartiko Kurniawan (Unsur Masyarakat);
- 4) Sdr. Darmanto (Unsur Pemerintah);
- 5) Sdr. Enderiman Butar Butar (Unsur Pemerintah);
- 6) Sdr. Fidelis Indriarto Diponegoro (Unsur Masyarakat);
- 7) Sdr. Gun Gun Siswadi (Unsur Masyarakat);
- 8) Sdr. I Hendrasmo (Unsur Masyarakat);
- 9) Sdr. M.M. Rini Purwandari (Unsur Masyarakat);
- 10) Sdr. Mohamad Kusnaeni (Unsur Masyarakat);
- 11) Sdr. Mohammad Rohanudin (Unsur RRI);
- 12) Sdr. Mohamad Sujai (Unsur Masyarakat);
- 13) Sdr. Rahadian Gingging M. (Unsur RRI);
- 14) Sdr. Sri Purwanto (Unsur Masyarakat);
- 15) Sdr. Yonas Markus Tuhuleruw (Unsur pemerintah)

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/05325/DPR RI/IV/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Penugasan untuk Membahas Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026, yang menyebutkan bahwa pembahasan terhadap Calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 diserahkan kepada Komisi I DPR RI.

Menindaklanjuti penugasan Surat Pimpinan DPR RI berdasarkan keputusan Rapat Bamus/Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI tanggal 8 April 2021, Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Intern pada tanggal 8 Maret 2021 dan tanggal 6 Mei 2021 memutuskan akan melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan persetujuan Calon Anggota Dewas RRI Periode 2021-2026.

Selanjutnya, di dalam pelaksanaan tersebut ada 2 (dua) calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 mengundurkan diri, yaitu atas nama: I Hendrasmo dan Sri Purwanto keduanya dari Unsur Masyarakat.

Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan *Fit and Proper Test* 15 (lima belas) Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 dari tanggal 19 sampai dengan 20 Mei 2021, Rapat bersifat tertutup.

E. UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP CALON DUBES LBBP RI UNTUK NEGARA SAHABAT

Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Juni 2021 menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Negara Sahabat dan Organisasi Internasional, sesuai dengan Surat Presiden RI Nomor R-25/Pres/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional.

Menindaklanjuti penugasan Rapat Paripurna tersebut di atas, dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 6 Juli 2021 telah menyetujui pembahasan Mekanisme dan Penjadwalan Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021.

Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan *Fit and Proper Test* terhadap 33 (tiga puluh tiga) calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional, dari tanggal 12 Juli sampai dengan 14 Juli 2021, Rapat bersifat tertutup.

Selanjutnya Komisi I DPR RI telah melaporkan kepada Pimpinan DPR hasil pelaksanaan Uji Kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) terhadap 33 (tiga puluh tiga) calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional guna disampaikan kepada Presiden secara rahasia (Pasal 231 ayat huruf c dan d Tatib).

IV. KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI

1. KUNKER SPESIFIK KOMISI I DPR RI

Disamping melaksanakan Rapat-rapat bersama Mitra Kerja Komisi I DPR RI, untuk mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I DPR RI, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi :

- a. Sumatera Barat tanggal 24-26 Mei 2021 kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke LPP TVRI Padang, Sumatera Barat dalam rangka untuk mengetahui :
 - Data tentang Jangkauan siaran TVRI berbasis wilayah dan penduduk;
 - Sejauh mana siaran muatan konten lokal yang dapat menampung dan melayani aspirasi/aktualisasi wilayah;
 - Sejauhmana persiapan TVRI Padang terkait dengan digitalisasi penyiaran dalam menyiapkan program, SDM, dan kanalnya;
 - Bagaimana format dan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi program TVRI Sumatera Barat.
- b. Aceh, tanggal 26-28 Mei 2021, kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Kodam Iskandar Muda Aceh dalam rangka mengetahui Kesiapan Kodam Iskandar Muda dalam Melaksanakan tugas Pokok TNI pada Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang Dengan Dukungan Alutsista dan Sarana Prasarana Yang Dimiliki, Serta Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas;
- c. Sumatera Utara, tanggal 28-30 Mei 2021, kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Kodam Bukit Barisan dalam rangka mengetahui Kesiapan Kodam I/Bukit Barisan dalam Melaksanakan tugas Pokok TNI pada Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang Dengan Dukungan Alutsista dan Sarana Prasarana Yang Dimiliki, Serta Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas;
- d. Jawa Barat, Bandung tanggal 4-6 Juni 2021, Kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Sesko TNI Bandung dalam rangka mengetahui Peran Sekolah Staf Komando TNI Dalam Menyiapkan Kader Pemimpin TNI Masa Depan Yang Handal dan Profesional, serta Adaptif Terhadap Perubahan;
- e. Jawa Barat, Bogor tanggal 4-6 Juni 2021 kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU dalam rangka mengetahui kesiapan Satuan Bravo-90 Untuk Melaksanakan Tugas Pokok TNI Dalam Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang Dengan Dukungan Alutsista dan Sarana Prasarana Yang Dimiliki, Serta Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas;

- f. Banten, Pandeglang tanggal 4-6 Juni 2021 kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam rangka mengetahui Pemanfaatan Internet BAKTI untuk Layanan Publik di Kantor Desa dan Puskesmas;
- g. Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 11-13 Juni 2021, kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dalam rangka untuk mengetahui Pemenuhan Kesejahteraan Bagi Prajurit dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan RSPAU dr. S. Hardjolukito D.I Yogyakarta;
- h. Jawa Tengah, Semarang tanggal 11-13 Juni 2021, kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke RSPAD Bhakri Wiratama Semarang dalam rangka untuk mengetahui Pemenuhan Kesejahteraan Bagi Prajurit dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang; dan
- i. Bali, tanggal 19-21 Juni 2021, kunjungan kerja Komisi I DPR RI spesifik ke Lanud I Gusti Ngurah Rai dalam rangka untuk mengetahui Rencana Modernisasi Alutsista Pada Satuan Jajaran Lanud I Gusti Ngurah Rai beserta Harwat dan Dukungan Anggarannya.

2. KUNJUNGAN LUAR NEGERI KOMISI I DPR RI

Sehubungan dengan Surat Edaran dari Pemerintah mengenai diberlakukannya PPKM Darurat dan dilanjutkan dengan PPKM Level 4 sampai dengan bulan Agustus 2021, dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas perwakilan Indonesia di Luar Negeri dan peningkatan hubungan kedua negara melalui Diplomasi Parlemen, Komisi I DPR RI belum dapat melaksanakan Kunker Luar Negeri ke beberapa Negara sampai dengan waktu yang akan ditentukan.

3. KUNKER RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Komisi I DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Reses MP V TS 2020-2021 dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2021 dengan melihat ketetapan dari Pemerintah terkait dengan pemberlakuan PPKM yang berlaku, dengan tujuan yaitu:

- b. Provinsi Sulawesi Utara
- c. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- d. Provinsi Papua Barat.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.

Jakarta, 26 Juli 2021
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001